

BPK-Pemda MoU

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kabupaten/kota dan Pemprov Kalbar.

Nota Kesepakatan tersebut mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Kepala BPK RI Hadi Poernomo mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.

"Melalui nota kesepahaman ini kita juga akan membentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik (E-auditee)," jelasnya, Kamis (16/6).

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mendukung langkah-langkah yang diambil BPK. "Saya kira ini adalah upaya yang baik dari BPK untuk mensinergikan antara pusat dengan daerah. Ini perlu didukung dan pemerintah daerah dalam hal ini harus transparan dan benar-benar memberikan laporan keuangan yang benar," sambungnya.

BPK RI juga menggelar kegiatan BPK Goes to Campus bertemakan *Peran BPK RI Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial* di Universitas Tanjungpura (Untan). (gal/sgt)